

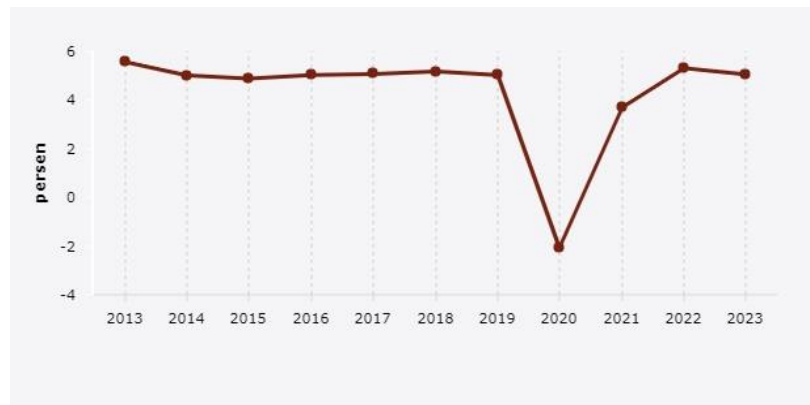
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana pemerintah memiliki peran krusial sebagai penggerak utama. Pemerintah memainkan peran strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu ukuran untuk menilai hasil pembangunan yang telah dilakukan dan menentukan arah pembangunan di masa mendatang. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan kemajuan ekonomi, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang negatif menunjukkan kemunduran (Lucya & Anis, 2019).

Pada era 1950-an dan 1960-an, para ekonom menganggap bahwa setiap negara harus mengalami proses pembangunan yang melibatkan serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan ini pembangunan sering kali dianggap sama dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi telah menjadi fokus utama bagi negara-negara maju dan berkembang. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Bruto (PDB) (Fahrizal et al., 2021).



Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS) 2023

Gambar 1. 1
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2023

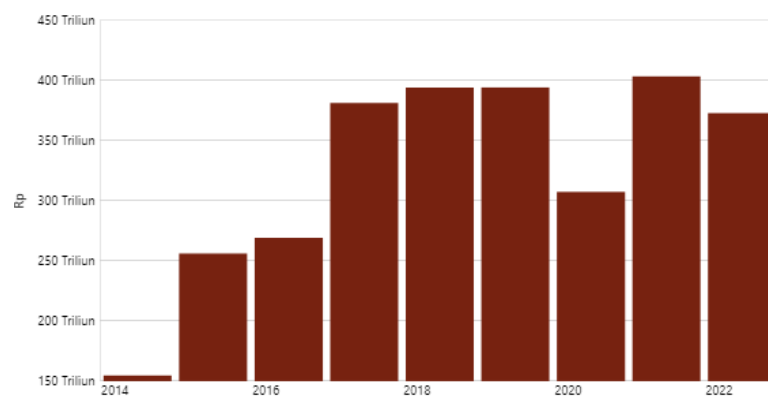
Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung fluktuatif. Pertumbuhan PDB Indonesia sejak 2016 mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada tahun tersebut, pertumbuhan mencapai 5,03%. Tahun berikutnya, terjadi kenaikan menjadi 5,07% pada 2017, dilanjutkan dengan peningkatan lagi pada 2018 menjadi 5,17%. Namun, terjadi penurunan pada 2019 dengan pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,02%. Tahun 2020 menjadi tahun yang sulit karena pertumbuhan ekonomi merosot tajam hingga mencapai -2,07%, dipicu oleh pandemi COVID-19 dan pembatasan sosial yang mengakibatkan penurunan aktivitas perekonomian. Meskipun kondisi pandemi masih berlangsung, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan mencapai 3,70% pada 2021. Kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2022 sebesar 5,31%, kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 5,05%. Walaupun angka pertumbuhan cenderung menunjukkan peningkatan namun angka tersebut belum dapat menyamai pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi. Hal ini tentunya menjadi hal yang perlu didorong agar

pertumbuhan ekonomi tetap menunjukkan angka positif dan semakin baik serta mampu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam menjalankan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan untuk meringankan beban sektor usaha. Prioritas utama adalah meminta pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas dan kemudahan agar kegiatan usaha dapat berjalan lancar. Prioritas kedua adalah meningkatkan pembangunan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia guna mengatasi tingkat pengangguran, seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, infrastruktur energi, transportasi, dan perumahan. Selain memberikan lapangan kerja, proyek infrastruktur juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung hal ini, alokasi anggaran infrastruktur akan diprioritaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Prioritas ketiga adalah upaya dari pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi serta membantu meringankan beban golongan menengah ke bawah yang mengalami kesulitan ekonomi (Bangun & Firdaus, 2009).

Infrastruktur memiliki peran sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara karena berbagai faktor seperti efisiensi produksi, konektivitas, akses pasar, dan daya tarik investasi (Wadana & Prijanto, 2021). Infrastruktur yang baik memungkinkan proses produksi menjadi lebih efisien dengan adanya jalan yang baik, sistem transportasi yang lancar, dan konektivitas yang optimal antarwilayah. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya logistik, tetapi juga meningkatkan output dan keuntungan. Selain itu, infrastruktur yang memadai

juga meningkatkan konektivitas antarwilayah, membuka akses pasar baru, dan memperluas jangkauan bisnis. Investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen yang sebelumnya sulit dijangkau baik di dalam negeri maupun internasional. Ini secara keseluruhan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lebih banyak peluang bisnis dan meningkatkan persaingan yang sehat (Dianti, 2017).



Sumber: Kementerian Keuangan Indonesia

Gambar 1. 2
Besaran Anggaran Infrastruktur Indonesia Tahun 2014-2022

Menurut data dari Kementerian Keuangan Indonesia pada tahun 2022, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 mengalokasikan dana sebesar Rp 392 triliun untuk infrastruktur pelayanan dasar, meningkat 7,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai pembangunan seperti rumah, sekolah, jalan, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Detail alokasi mencakup pembangunan 8.741 unit rumah, 801 unit sekolah, SPAM dengan kapasitas 2.313,6 liter per detik, dan 571 km jalan. Selama 10 tahun terakhir, anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2021, mencapai Rp 417,4 triliun, dengan penurunan 12,3% pada tahun berikutnya. Namun, secara

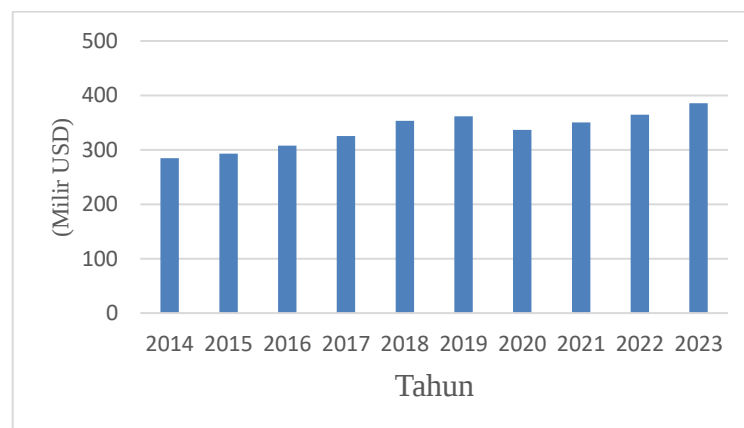
umum, anggaran infrastruktur cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun mengalami fluktuasi. Pengalokasian dana infrastruktur menjadi langkah penting dalam membangun Indonesia menuju negara maju, makmur, adil, dan bermartabat, karena investasi di sektor pembangunan merupakan hal yang tidak dapat ditunda (Richter et al., 2018).

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mengurangi besaran biaya logistik (Wadana & Prijanto, 2021). Sejak tahun 2020 besaran biaya logistik Indonesia selalu lebih besar dari negara tetangga bahkan menjadi yang tertinggi di kawasan Asia. Data Kementerian Keuangan mencatat rasio biaya logistik terhadap PDB Indonesia tahun 2023 mencapai angka 24%. Sementara itu Vietnam dengan rasio biaya logistik sebesar 20%, Thailand 15% dan China 14%. Negara dengan rasio biaya logistik terhadap PDB terendah di raih oleh Jepang dan Singapura dengan mencatatkan angka masing-masing 8%, disusul oleh Korea Selatan dan Taiwan di peringkat selanjutnya dengan rasio biaya logistik terhadap PDB masing-masing sebesar 9%. Salah satu penyebab tingginya rasio biaya logistik Indonesia terhadap PDB adalah karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan terbatasnya kondisi infrastruktur di Indonesia. Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih harus berlanjut, sementara itu, penyederhanaan proses bisnis layanan pemerintah menjadi penting untuk menghindari duplikasi. Selain itu juga terdapat masalah asimetri informasi terkait kebutuhan dan penyediaan jasa logistik yang perlu diperhatikan.

Bank Dunia membagi infrastruktur ke dalam tiga golongan. Pertama, infrastruktur ekonomi yaitu aset fisik dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi

meliputi *public utilities* (air bersih, sanitasi, gas, dan telekomunikasi), *public works* (jalan, saluran irigasi, drainase, dan bendungan) serta sektor transportasi (jalan kereta api, angkutan pelabuhan, dan bandara). Kedua, infrastruktur sosial meliputi kesehatan, rekreasi, perumahan, dan pendidikan. Ketiga, infrastruktur administrasi atau institusi yang meliputi kebudayaan, kontrol administrasi dan koordinasi, serta penegakan hukum (Sahoo et al., 2016).

Infrastruktur memadai dan berkembang akan mempengaruhi nilai investasi di suatu wilayah. Teori pertumbuhan Neoklasik menyatakan bahwa persediaan modal, angkatan kerja, dan teknologi digunakan untuk menentukan pertumbuhan ekonomi. Proksi dari investasi kapital salah satunya yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB yaitu penambahan serta pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi yang mempunyai umur pemakaian dengan jangka waktu yang relatif panjang (Badan Pusat Statistika, 2024).



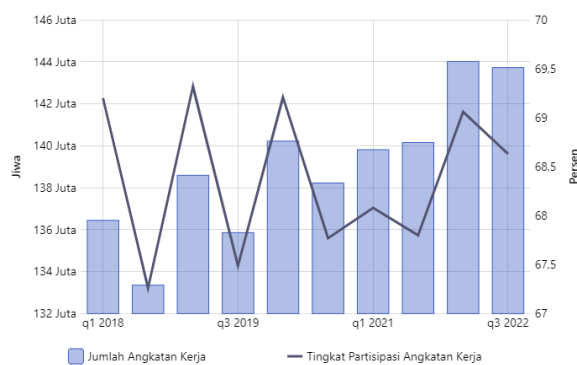
Sumber: World Bank

Gambar 1. 3
Perkembangan PMTB di Indonesia Tahun 2014-2023

Berdasarkan gambar 1.3, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun ada fluktuasi. PMTB mengalami kenaikan stabil antara 2014 dan 2019, namun

mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Setelah itu, PMTB kembali meningkat pesat mencapai puncaknya mendekati 390 miliar USD pada 2023. Laju pertumbuhan lebih cepat terlihat setelah 2020, menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat. Secara keseluruhan, grafik ini mencerminkan perkembangan positif di Indonesia. Semakin besar nilai PMTB maka akan semakin besar pula output suatu wilayah dan penyerapan angkatan kerja di wilayah tersebut (Azizah, 2022).

Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadi salah satu faktor positif karena dapat meningkatkan angkatan kerja (Mukamad, 2017). Angkatan kerja adalah bagian dari populasi yang terlibat dalam kegiatan produktif dan menjadi komponen dari angkatan kerja. *International Labor Organization* (ILO) membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang bukan merupakan angkatan kerja dan mereka yang termasuk dalam angkatan kerja, yang merupakan bagian dari populasi usia kerja (Jan et al., 2015).

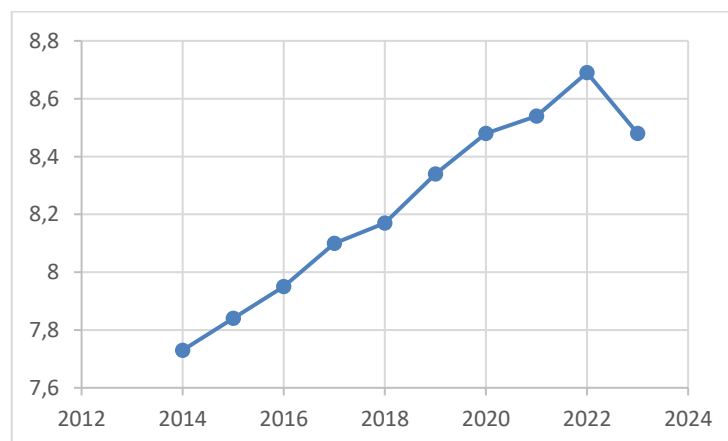


Sumber: Publikasi databoks.kata.data.co.id

Gambar 1. 4
Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Indonesia Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar 1.4, perkembangan angkatan kerja di Indonesia sejak tahun 2018-2022 terus mengalami pertumbuhan. Jumlah angkatan kerja tertinggi yaitu di tahun 2022 sebesar 143,86 juta jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 68,85%. Berbeda dengan angkatan kerja yang cenderung naik tingkat partisipasi tenaga kerja cenderung fluktuasi dari tahun ke tahun. Tingkat partisipasi tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 68,85% dan terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 67,94% dengan jumlah tenaga kerja sebesar 139,98 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga akan menyebabkan peningkatan angkatan kerja dan tenaga kerja (Todaro & Smith, 2011)

Salah satu faktor yang memengaruhi tenaga kerja adalah tingkat pendidikan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan meningkatkan tingkat pendidikan, yang merupakan salah satu bentuk modal manusia (Mankiw, 2008). Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan dan pembangunan karena memungkinkan penyerapan teknologi dan pengembangan kapasitas. Sebagai fondasi bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pendidikan memiliki peran krusial (Lucya, 2019). Tingkat pencapaian dalam pembangunan pendidikan, yang dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dapat dilihat dari rata-rata lama masa sekolah (Fahrizal et al., 2021).



Sumber: Badan Pusat Statistika (BPS) 2024

Gambar 1. 5
Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia Tahun 2013-2022

Tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum (Budiarti, 2011). Berdasarkan gambar 1.5, perkembangan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas di Indonesia tahun 2014-2023 meningkat setiap tahunnya. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2022 sebesar 8,69 tahun, hal tersebut meningkat sebesar 1,22% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,54 tahun. Rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Indonesia bersekolah sampai kelas 2 SMP.

Perkembangan infrastruktur memegang peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun keberhasilannya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, tenaga kerja yang terampil, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai infrastruktur jalan, listrik, dan telekomunikasi di Indonesia, namun masih sedikit yang menyelidiki dampak keseluruhan infrastruktur dengan menggunakan metode

Principal Component Analysis (PCA). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh infrastruktur, PMTB, angkatan kerja, dan pendidikan terhadap produk domestik bruto di Indonesia dalam rentang waktu tahun 1991-2023.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan adanya inkonsistensi berupa *research gap* dari hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan mengambil judul tentang “Pengaruh infrastruktur, pendidikan, tenaga kerja, dan pembentukan modal tetap bruto terhadap produk domestik bruto di Indonesia tahun 1991-2023”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana pengaruh infrastruktur, pembentukan modal tetap bruto, tenaga kerja, dan pendidikan secara parsial dalam jangka pendek maupun panjang terhadap produk domestik bruto di Indonesia tahun 1991-2023?
2. Bagaimana pengaruh infrastruktur, pembentukan modal tetap bruto, tenaga kerja, dan pendidikan secara bersama-sama terhadap produk domestik bruto di Indonesia tahun 1991-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur, pembentukan modal tetap bruto, tenaga kerja, dan pendidikan secara parsial dalam jangka pendek maupun panjang terhadap produk domestik bruto di Indonesia tahun 1991-2023;
2. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur, pembentukan modal tetap bruto, tenaga kerja, dan pendidikan secara bersama-sama terhadap produk domestik bruto di Indonesia tahun 1991-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini akan menjelaskan tentang infrastruktur, pendidikan, angkatan kerja, dan pembentukan modal tetap bruto terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Di samping itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penulis sejenis tentang pengaruh infrastruktur, pendidikan, angkatan kerja, dan pembentukan modal tetap bruto terhadap produk domestik bruto di Indonesia. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Pengembangan ilmu, penelitian ini dapat memperkaya literatur ekonomi dengan memberikan bukti empiris mengenai interaksi dan kontribusi antar variabel terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat membantu akademisi dan peneliti lain untuk mengembangkan teori-teori baru dan memperdalam pemahaman tentang proses pembangunan ekonomi di Indonesia.
2. Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan terintegrasi melalui pemahaman mengenai peran infrastruktur dalam meningkatkan efisiensi, pentingnya pendidikan untuk

